

LAPORAN KINERJA (LK)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA

Jln. Besar Lima Puluh Simp. Dolok Km. 8 Pulau Sejuk
Kecamatan Datuk Lima Puluh
Telp/Fax (0622) 96375–Kode Pos 21255



KATA PENGANTAR

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara selaku pelaksana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menyusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2025, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mengacu pada visi dan misi Kabupaten Batu Bara, yang tertuang dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 - 2029.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Kami mohon saran dan pendapat untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini untuk masa yang akan datang.

Datuk Lima Puluh, 31 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA



EDY ALDRIN SITORUS, SE., S.Sos., M.Si
PIMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690726 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Isu-isu Strategis	4
D. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara.....	5
E. Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA ...	7
A. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara.....	7
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP.....	22



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 - 2029.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara;
- b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara;
- c. Meningkatkan kredibilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah / Delegasi Wewenang;
- d. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara sebagai Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Batu Bara antara lain :

1. Menurunnya rasa satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat;
2. Seringnya terjadi konflik antar nelayan di perairan Kabupaten Batu Bara;
3. Antisipasi terhadap berkembangnya organisasi terlarang di masyarakat;
4. Menurunnya peran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi termasuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik dan sosialisasi;
5. Pengaruh Budaya asing yang mengakibatkan pergeseran budaya asli dan berdampak negatif bagi budaya lokal. Hal ini diakibatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat;

6. Peran LSM/ORMAS dalam pembangunan sangatlah baik, maka dalam hal ini perlu dilakukan pembinaan secara berkala untuk menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

D. TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara adalah membantu Bupati Batu Bara dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja, maka Sistematis penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I - PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

Bab III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara selama Tahun 2025 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

Bab IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara yang mencakup tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025.

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA

1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara adalah dengan melakukan pengkoordinasian perumusan

kebijakan, penyelenggaraan administrasi, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Kebijakan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 dalam Arah Kebijakan Umum Bidang Pemerintahan ditujukan pada kelancaran penyelenggaraan urusan tata pemerintahan, penataan aparatur, pengelolaan keuangan dan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara dalam mendukung strategi pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada kemampuan melaksanakan pelayanan prima dengan melibatkan aparatur terkait. Kebijakan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
- 2) Menampung setiap informasi berkaitan dengan potensi konflik yang kemudian ditangani sehingga konflik tidak terjadi.
- 3) Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdaftar di Kabupaten Batu Bara.
- 4) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat tentang kehidupan politik demokratis.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur serta fungsi sarana dan prasarana.



**Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara**

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BATU BARA YANG BERORIENTASI PELAYANAN, AMANAH, HARMONIS, AKUNTABEL, GIAT, INOVATIF, DAN ADIL UNTUK BATU BARA YANG BAHAGIA			
MISI Ke-1 : Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat			
<u>Tujuan 1</u> Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	<u>Sasaran 1.1</u> Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan	<u>Strategi 1.1</u> Melakukan pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat <u>Strategi 1.2</u> Memberdayakan Peran Tim Terpadu Penanganan Koflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Pemantau Perkembangan Politik, serta Parpol di Kabupaten Batu Bara untuk deteksi secara dini terhadap gejolak sosial, politik, ketertiban dan keamanan	<u>Kebijakan 1.1</u> Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan <u>Kebijakan 1.2</u> Menampung setiap informasi berkaitan dengan potensi konflik yang kemudian ditangani sehingga konflik tidak terjadi
<u>Tujuan 1</u> Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	<u>Sasaran 1.1</u> Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945	<u>Strategi 1.1</u> Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	<u>Kebijakan 1.1</u> Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdaftar di Kab. Batu Bara



	<p>Sasaran 2.1 Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat</p>	<p>Strategi 1.2 Melakukan koordinasi dengan elemen masyarakat dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis</p> <p>Strategi 2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara</p>	<p>Kebijakan 1.2 Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat tentang kehidupan politik demokratis</p> <p>Kebijakan 2.1 Meningkatkan kualitas SDM aparatur serta fungsi sarana dan prasarana</p>
--	--	---	--

B. PERJANJIAN KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Batu Bara	Indeks Harmoni Indonesia (Kabupaten Batu Bara)	Indeks	6
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93
		Nilai AKIP	Nilai	BB (77,60)

Untuk mendukung tercapainya target kinerja, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara telah menetapkan program kerja beserta anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2025, seperti pada tabel berikut :



Tabel 3. Program dan Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.127.985.794	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.200.037.522	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.362.486.000	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	805.000.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	540.861.100	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	7.153.071.500	APBD
JUMLAH		15.189.441.916	APBD

Adapun faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara, antara lain :

1. Penanganan Konflik Sosial di wilayah Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Batu Bara.
2. Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kabupaten dan kecamatan.



3. Peningkatan Kerjasama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Batu Bara
4. Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Batu Bara.
5. Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Batu Bara.
6. Peringatan Hari Lahir Pancasila.
7. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
8. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
9. Peringatan Hari Bela Negara.
10. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
11. Pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Batu Bara
12. Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar di Kabupaten Batu Bara.

Sedangkan faktor-faktor penghambat untuk mencapai target kinerja, antara lain :

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi.
2. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan, sehingga belum optimalnya penyampaian informasi secara cepat mengenai potensi konflik yang terjadi di tingkat desa/kelurahan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan mengukur pencapaian sasaran, dibutuhkan tolok ukur atau standar atau sering disebut indikator. Karena tanpa indikator kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan secara baik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Secara umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Analisis capaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2025 diuraikan berdasarkan sasaran, sebagai berikut :



Sasaran 1:

Meningkatnya kehidupan masyarakat harmonis di Kabupaten Batu Bara

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Batu Bara	Indeks	6,0	N/A	N/A

Tujuan dari pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Batu Bara adalah untuk mendeteksi kondisi harmoni dan potensi konflik secara dini di Kabupaten Batu Bara. Manfaat dari Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah memberikan cermin objektif atas kondisi sosial di wilayah Kabupaten Batu Bara, sekaligus menjadi alat bantu dalam menyusun program prioritas dan mitigasi resiko sosial. Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Batu Bara mencakup beberapa dimensi yaitu Harmoni Ekonomi, Harmoni Sosial, Harmoni Budaya, Harmoni Keragaman/Religius.

Mekanisme pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Batu Bara adalah dengan cara Sosialisasi Digital, Survei Online, Responden, dan Pengumpulan Data. Jumlah responden minimal sebanyak 1250 orang di setiap Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2025 Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Batu Bara belum terealisasi dikarenakan sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 200.1/6874/2025 tanggal 31 Juli 2025 hal Permohonan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia bahwa pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten/Kota dimulai pada tahun 2026.



Sasaran 2 :

Meningkatnya etika dan budaya politik

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pileg dan Pilkades	Persentase	N/A	N/A	N/A

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut diatas tidak dapat di lakukan pengukuran dikarenakan pada Tahun 2025 tidak ada terlaksananya Pilkada, Pileg, maupun Pilkades.



Sasaran 3 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	96,87	104,16
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	BB (77,60)	BB (77,60)	100

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara melalui aplikasi si Sukma terhadap pelayanan-pelayanan sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Keterangan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang melaporkan keberadaannya di Kabupaten Batu Bara.
2. Penerbitan Surat Rekomendasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara.
3. Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian bagi mahasiswa atau kelompok kerja lainnya.

Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 3 (tiga) pelayanan di atas dengan nilai 96,87 dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai 93 dengan predikat Sangat Baik.

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara memperoleh nilai BB (77,60) dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai BB (77,60).

Berikut disampaikan tabel capaian kinerja berdasarkan rencana jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.



**Tabel 5. Capaian kinerja berdasarkan rencana jangka menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)										
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat harmonis di Kabupaten Batu Bara	Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Batu Bara	-	-	-	6,0	6,1	6,2	6,3	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-
2	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pilleg dan Pilkadaes	N/A	-	N/A	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	-	93	93,5	94	94,5	95	96,87	-	-	-	-	104,16	-	-	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (77,60)	-	BB (77,60)	BB (77,80)	BB (78,00)	BB (78,20)	BB (78,40)	BB (77,60)	-	-	-	-	100	-	-	-	-



Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sudah memadai.
3. Kerjasama dengan perangkat daerah lainnya, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi.
2. Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal.
3. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.
4. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan, sehingga belum optimalnya penyampaian informasi secara cepat mengenai potensi konflik yang terjadi di tingkat desa/kelurahan.

Adapun Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kehidupan masyarakat harmonis di Kabupaten Batu Bara	Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Batu Bara	Indeks	6	n/a	-	9.698.970.122,00	9.426.236.002,00	97,19	-
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pilleg dan Pilkadaes	Persen	n/a	n/a	-	2.362.486.000,00	2.360.186.000,00	99,90	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	96,87	104,16	1.178.781.546,00	948.929.049,00	80,50	1,03
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	77,6	77,6	100,00	1.949.204.248,00	1.871.864.334,00	96,03	0,99



Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa anggaran dapat dikelola dengan baik dan pelaksanaan program sudah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Adapun indikator Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Batu Bara ditunjang dengan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan oleh bidang Kesatuan Bangsa, dan juga Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pilleg dan Pilkadaes ditunjang dengan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang dilaksanakan oleh bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.



B. Realisasi Anggaran

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dan realisasinya pada tahun 2025 sebagai berikut :

No	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.944.854.248,00	1.867.514.334,00	77.339.914,00
2	Belanja Hibah	9.537.346.400,00	9.437.346.400,00	100.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa	3.648.241.268,00	3.244.685.151,00	403.556.117,00
5	Belanja Modal	59.000.000,00	57.669.500,00	1.330.500,00
T O T A L		15.189.441.916,00	14.607.215.385,00	582.226.531,00



BAB IV

PENUTUP

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam tiga tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara tahun 2025 - 2029, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas - tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara Tahun 2025 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Dari 4 (empat) sasaran strategis yang direncanakan, sebagian besar berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Pada umumnya kinerja yang tidak mencapai dari target disebabkan adanya pertimbangan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program.



Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan. Permasalahan / kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Datuk Lima Puluh, 31 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA



EDWIN ALDRIN SITORUS, SE., S.Sos., M.Si
PEMERINTAH UTAMA MUDA
NIP. 19690726 199303 1 005

